

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan, terhadap penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2020 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Efektifitas pendapatan, pada tahun 2017 dan 2020 tergolong sangat efektif karena, rasio efektifitasnya di atas 100% yaitu 110% dan pada tahun 2020 rasio efektifitasnya 103%. Pada tahun 2018 dan 2019 rasio efektifitas PAD tergolong Efektif dengan nilai rasio yang dicapai pada tahun 2018 mencapai 96% dan 2019 mencapai angka 95%
2. Rasio derajat desentralisasi tergolong kurang. Hal ini dikarenakan pendapatan asli Daerah Kota Kupang mengalami penurunan dari tahun 2017-2020.
3. Rasio ketergantungan keuangan daerah tergolong sangat tinggi. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Kota Kupang sangat tergantung dengan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dan pinjaman hal ini disebabkan karena kurangnya pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah Daerah Kota Kupang.
4. Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah sekali. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Daerah Kota Kupang belum mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahannya dilihat dari realisasi penerimaan PAD yang relatif menurun dibandingkan penerimaan dana transfer.

Menurunannya komponen PAD ini disebabkan karena retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak mencapai target dan cenderung menurun. Sementara penerimaan dana perimbangan yang relatif besar.

5. Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang negatif dan positif. Hal ini disebabkan oleh pendapatan tahun sebelumnya lebih besar dibandingkan tahun 2018 dan 2020
6. Rasio efisiensi pendapatan tergolong sangat efisien. Hal ini dikarenakan tidak terjadi pemborosan dan pemerintah Daerah Kota Kupang mampu menekankan biaya dalam melakukan pemungutan PAD
7. Analisis varians belanja, menunjukkan kinerjanya baik dimana terdapat selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja bersaldo positif.
8. Analisis pertumbuhan belanja, berdasarkan penelitian kinerja belanja Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2017-2020 ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja belum dikatakan positif.
9. Rasio keserasiaan belanja, kinerjanya kurang baik karena pemerintah daerah Kota Kupang lebih banyak anggaran untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal.
10. Analisis pembiayaan keuangan daerah, belum bisa dikatakan kinerjanya baik karena pada tahun 2019 sisa lebih perhitungan anggarannya (SiLPA) mengalami *minus*.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat beberapa rasio keuangan daerah yang tidak mencapai target yang telah ditentukan dalam pengukuran kinerja keuangan diantaranya adalah derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah, maka terdapat beberapa saran untuk pemerintah daerah Kota Kupang sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemampuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah.
2. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.
3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan mampu membiaya penyelenggaraan pemerintahanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim.(2012).*Akuntansi Keuangan Daerah*. Selembar Empat: Jakarta
- Badan Keuanga Daerah Kota Kupang.(2022).Data laporan realisasi anggaran tahun 2017-2020
- Elly Susanti,K. R.(2017).Analisis RasioLaporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Ekonomi–Akuntansi*
- Elizar Sinambela,F. S.(2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 18(2)*.
- Fathah, R. N. (2018). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ebbank, 8(1)*, 33–48.
- Joko Pranomo.(2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta).Vol.7 No 13.
- Mus'id, M. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 12(2)*,222–241.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. STIE YKPN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja sektor publik edisi kedua*. UPP. STIM
- Muryani.2015. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan Laporan Perhitungan APBD. Skripsi, Universitas Sanata Dharma
- Mohammad Mahsun (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yokyakarta
- Pramono, J.(2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*Among Makarti, 7(13)*.
- Pohan, E. S. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi&Bisnis, 16(1)*.

- Puput Risky Pramita (2015). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013
- Siregar, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat), Volume 9. Journal IMAGE Number 1, page 1-19.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah“
- Utomo, D. P. (2017). Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. *Jurnal Education*, 6(2),57–80.
- Undang-undang no 32 tentang pemerintah daerah, dpr 249 (2004).
<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Zulia Hanum. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. <http://jurnal.umsu.ac.id>